

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR  
DI DESA BALINGGI JATI KECAMATAN BALINGGI  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Ni Putu Ayu Susyanti<sup>1)\*</sup>, Muzakir Tawil<sup>2)</sup>, Richard F. Labiro<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[ayususyanti03@gmail.com](mailto:ayususyanti03@gmail.com)

<sup>2</sup> Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[tawilmute@gmail.com](mailto:tawilmute@gmail.com)

<sup>3</sup> Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[labirorichard@gmail.com](mailto:labirorichard@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Banjir yang terjadi hampir setiap tahun menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana masih memperlihatkan keterpisahan antar tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong, Pemerintah Desa Balinggi Jati, serta masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan banjir lebih berorientasi pada penanganan saat dan setelah bencana, seperti evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan lingkungan. Sementara itu, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana belum terbangun secara sistematis akibat keterbatasan dukungan anggaran, serta koordinasi antar lembaga yang bersifat situasional. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan penanggulangan bencana yang terintegrasi antar tahapan, khususnya melalui penguatan perencanaan prabencana dan kelembagaan di tingkat desa.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Bencana, Kemampuan Administratif

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the implementation of flood disaster management policies in Balinggi Jati Village, Balinggi District, Parigi Moutong Regency, Central Sulawesi Province. Flood events occurring almost every year indicate that the implementation of disaster management policies still reflects a separation among the pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation involving the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Parigi Moutong Regency, the Balinggi Jati Village Government, and local communities. The analysis is guided by the policy implementation framework proposed by Knill and Tosun (2020). The findings show that flood disaster management policy is more oriented toward response and post-disaster activities, such as evacuation, aid distribution, and environmental recovery. Meanwhile, pre-disaster mitigation and preparedness have not been systematically developed due to limited budget support and situational inter-agency coordination. These findings highlight the need to strengthen an integrated disaster management policy across all phases, particularly through enhanced pre-disaster planning and institutional capacity at the village level.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Disaster Management, Administrative Capacity*

Submisi: 25-04-2026  
Diterima: 26-04-2026  
Dipublikasikan: 05-05-2026

## PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun aktivitas manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan psikologis (UU No. 24 Tahun 2007). Secara konseptual, bencana dipahami sebagai gangguan serius terhadap fungsi masyarakat yang melampaui kapasitas sumber daya setempat untuk mengatasinya (Carter, 2008). Salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir, yang bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh interaksi faktor hidrometeorologi dan aktivitas manusia, seperti perubahan tata guna lahan, degradasi wilayah hulu, serta lemahnya pengelolaan lingkungan (Suripin, 2004; Kodoatie & Sjarief, 2010).

Dampak banjir tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kerentanan sosial, seperti rendahnya kapasitas institusional dan minimnya kesadaran lingkungan, dapat memperbesar risiko dan dampak bencana (Wisner et al., 2004). Oleh karena itu, penanggulangan banjir tidak cukup dilakukan pada tahap tanggap darurat, melainkan harus dimulai sejak tahap prabencana melalui upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang sistematis dan berkelanjutan (Coppola, 2015). Dalam konteks Indonesia, penanggulangan bencana telah diatur secara komprehensif melalui UU No. 24 Tahun 2007 yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam seluruh siklus penanggulangan bencana.

Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Parigi Moutong, merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan banjir cukup tinggi akibat kondisi geografis, karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Desa Balinggi Jati menjadi salah satu wilayah dengan indeks risiko banjir tinggi dan mengalami kejadian banjir hampir setiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir bukan lagi peristiwa insidental, melainkan masalah struktural yang memerlukan kebijakan mitigasi yang efektif dan kontekstual.

Sebagai bentuk komitmen regulatif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 sebagai landasan umum penanggulangan bencana. Dalam tataran implementasi, BPBD Kabupaten Parigi Moutong berperan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah. Namun, realitas di Desa Balinggi Jati menunjukkan adanya anomali implementasi, di mana pemerintah desa lebih banyak menjalankan kegiatan penanggulangan bencana secara operasional di lapangan. Peran desa terbatas pada koordinasi, penanganan darurat, dan dukungan kepada masyarakat terdampak. Kondisi ini menyebabkan upaya pengurangan risiko banjir yang menasar faktor penyebab, seperti aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu DAS dan perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai, masih belum berjalan secara maksimal.

Permasalahan implementasi semakin diperkuat oleh kesenjangan kapasitas administratif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Di satu sisi, pemerintah daerah mengelola sumber daya anggaran yang relatif besar, namun di sisi lain, pemerintah desa mengalami keterbatasan fiskal akibat pengaturan Dana Desa yang lebih difokuskan pada kondisi tanggap darurat. Situasi ini menyebabkan terjadinya

“kelumpuhan preventif”, di mana desa tidak memiliki ruang kebijakan yang memadai untuk membiayai upaya mitigasi prabencana. Kelemahan tersebut diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap aktivitas di wilayah hulu DAS serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap solusi teknis sementara yang dinilai tidak efektif di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Desa Balinggi Jati secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun untuk mengidentifikasi hambatan struktural dalam desain kebijakan, pilihan instrumen, kapasitas administratif, dan struktur pengawasan yang menyebabkan kegagalan dalam mereduksi risiko banjir tahunan secara berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri suatu skenario yang sedang berlangsung pada saat penelitian dan menganalisis alasan di balik suatu gejala tertentu (Hikmat, 2014: 44). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan strategi penelitian deskriptif. Menurut Asmadi Rukajat, (2018) dalam bukunya *pendekatan penelitian kualitatif*, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa informan atau narasumber yang berhubungan secara langsung dengan penanggulangan bencana banjir di desa Balinggi Jati. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, informan pada penelitian ini menjadi salah satu hal yang diperlukan dan sangat penting dalam penelitian ini. Informasi diperoleh dari keterangan informan yang diambil. Sedangkan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dokumen dari berbagai sumber resmi, antara lain surat keputusan peraturan perundang-undangan laporan penelitian data kelembagaan, dokumen dokumen berupa foto-foto, serta naskah-naskah yang terkait dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Desa Balinggi Jati, Kec. Balinggi Kab. Parigi Moutong Prov Sulawesi Tengah dan lainnya sebagai bahan acuan untuk peneliti dalam mendeskripsikan fenomena penelitian.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive*. Menurut Sugiyono (2017:85) menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, karena subjek yang dipilih dianggap paling mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini adalah pihak terkait, yaitu pejabat penyelenggara dan pelaksana teknis penyelenggara, yakni Pemerintah Desa Balinggi Jati, BPBD Parigi Moutong, dan Masyarakat.

Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri, dan menggunakan buku-buku dan alat tulis, alat-alat dokumentasi untuk mendapatkan berbagai data dan informasi. Analisis yang dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan

data deskriptif. Penelitian kualitatif melibatkan analisis data selama dan setelah pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33), langkah analisis data model interaktif yaitu pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi dalam bentuk kata-kata, bukan angka, yang diperoleh dengan metode seperti observasi, wawancara, analisis dokumen, dan pencatatan. Data ini biasanya diproses melalui pencatatan, pengetikan, pengeditan, atau transkripsi. Kondensasi data melibatkan pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan konversi data dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, makalah, dan sumber empiris lainnya. Penyajian data adalah pengumpulan informasi secara sistematis yang memungkinkan untuk menghasilkan kesimpulan. Penyajian data memungkinkan pemahaman yang jelas tentang situasi dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Menarik kesimpulan dan memverifikasi makna data harus diperiksa kebenaran dan validitasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Risiko Banjir Di Kecamatan Balinggi

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Balinggi dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat risiko banjir sedang. Desa Balinggi Jati sebagai bagian dari wilayah tersebut memiliki tingkat ancaman dan kerentanan yang cukup signifikan terhadap bencana banjir. Factor utama penyebab banjir meliputi curah hujan tinggi, keterbatasan sistem drainase lingkungan, serta pembukaan lahan di hulu. Tingkat resiko banjir tersebut berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat, khususnya sector pertanian dan pemukiman yang berada di sekitar bantaran sungai.

Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023–2028 menilai risiko bencana berdasarkan tiga komponen, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Bahaya ditentukan oleh probabilitas dan intensitas kejadian, kerentanan mencakup aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, sedangkan kapasitas dilihat dari ketahanan sektor pemerintahan. Hasil penggabungan ketiga komponen tersebut disajikan dalam peta dan tabel risiko dengan klasifikasi bahaya rendah, sedang, dan tinggi, sehingga memberikan gambaran potensi serta tingkat dampak bencana pada suatu wilayah.

Indeks bahaya banjir digunakan untuk memetakan tingkat bahaya banjir suatu wilayah secara spasial berdasarkan peta administrasi, DEM, daerah aliran sungai, jaringan sungai, dan zona rawan banjir RTRW Kabupaten Parigi Moutong.

**Tabel 1. Potensi Luas Zona Rawan Bahaya Banjir**

No.	Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Ampibabo	932	189	7	1,128	SEDANG
2	Balinggi	542	1,152	972	2,667	SEDANG
3	Bolano	724	1,028	374	2,126	SEDANG
4	Bolano Lambunu	915	945	169	2,029	TINGGI
5	Kasimbar	533	760	173	1,465	SEDANG
6	Mepanga	519	864	342	1,725	TINGGI

7	Moutong	297	343	242	882	TINGGI
8	Ongka Malino	486	847	332	1,666	SEDANG
9	Palasa	310	92	5	407	SEDANG
10	Parigi	260	284	11	556	SEDANG
11	Parigi Barat	528	355	6	889	SEDANG
12	Parigi Selatan	520	1,092	170	1,781	SEDANG
13	Parigi Tengah	223	203	4	430	SEDANG
14	Parigi Utara	252	131	1	385	RENDAH
15	Sausu	761	1,162	270	2,193	SEDANG
16	Sidoan	268	207	32	507	SEDANG
17	Siniu	272	103	1	376	SEDANG
18	Taopa	594	1,514	590	2,698	SEDANG
19	Tinombo	-	-	-	-	RENDAH
20	Tinombo Selatan	608	565	48	1,221	SEDANG
21	Tomini	353	264	6	623	SEDANG
22	Toribulu	426	515	27	968	SEDANG
23	Torue	347	672	316	1,332	SEDANG
<b>Kab Parigi Moutong</b>		<b>10,668</b>	<b>13,287</b>	<b>4,096</b>	<b>28,051</b>	<b>TINGGI</b>

(Sumber Gambar: Dokumen Kajian Rencana Bencana Parigi Moutong tahun 2023-2028)

Berdasarkan Tabel, Kecamatan Balinggi memiliki total potensi bahaya banjir seluas 2.667 Ha yang didominasi oleh kelas bahaya sedang seluas 1.152 Ha, diikuti bahaya tinggi seluas 972 Ha dan bahaya rendah seluas 542 Ha, sehingga Kecamatan Balinggi dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat bahaya banjir sedang, sehingga menunjukkan tingkat ancaman banjir yang perlu mendapat perhatian.

Pengkajian kerentanan banjir didasarkan pada komponen sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar serta potensi kerugian akibat bencana banjir.

**Tabel 2. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Banjir Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk miskin	Penduduk cacat	
1	Ampibabo	7,790	2,787	6,716	50	TINGGI
2	Balinggi	3,168	2,330	1,773	96	TINGGI
3	Bolano	7,036	1,814	4,869	103	TINGGI
4	Bolano Lambunu	6,320	2,523	5,126	112	TINGGI
5	Kasimbar	10,858	3,052	6,590	81	TINGGI
6	Mepanga	8,502	2,836	7,800	50	TINGGI
7	Moutong	6,557	3,393	8,933	121	TINGGI
8	Ongka Malino	6,029	3,010	4,887	58	TINGGI
9	Palasa	2,412	1,371	1,470	2	TINGGI
10	Parigi	4,385	1,529	4,550	112	TINGGI
11	Parigi Barat	3,764	1,002	2,447	15	TINGGI
12	Parigi Selatan	3,815	2,287	4,001	58	TINGGI
13	Parigi Tengah	3,582	799	2,251	81	TINGGI
14	Parigi Utara	1,095	748	1,649	69	TINGGI
15	Sausu	2,844	1,910	3,979	26	TINGGI
16	Sidoan	6,171	1,096	5,134	18	TINGGI
17	Siniu	5,794	1,128	3,391	13	TINGGI

18	Taopa	3,473	1,478	3,999	59	TINGGI
19	Tinombo	6,315	1,927	2,817	19	TINGGI
20	Tinombo Selatan	10,492	2,732	9,117	120	TINGGI
21	Tomini	6,380	3,010	5,934	52	TINGGI
22	Toribulu	5,133	1,284	4,182	126	TINGGI
23	Torue	2,664	1,253	2,306	433	TINGGI
Kab Parigi Moutong		124,579	45,300	103,921	1,484	TINGGI

(Sumber Gambar: Dokumen Kajian Rencana Bencana Parigi Moutong tahun 2023-2028)

Kecamatan Balinggi memiliki 3.168 jiwa terpapar banjir, dengan 2.330 jiwa kelompok rentan, termasuk 1.773 jiwa kelompok umur rentan dan 96 jiwa penyandang disabilitas. Kondisi ini menempatkan Balinggi pada kelas kerentanan sosial TINGGI.

**Tabel 1. Potensi Kerugian Bencana Banjir Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas	Luas	Kelas
1	Ampibabo	97.34	4.94	102	TINGGI	267	SEDANG
2	Balinggi	134.36	9.35	144	TINGGI	487	RENDAH
3	Bolano	71.87	3.57	75	TINGGI	342	SEDANG
4	Bolano Lambunu	92.77	15.29	108	TINGGI	545	SEDANG
5	Kasimbar	81.62	8.83	90	TINGGI	328	TINGGI
6	Mepanga	135.06	80.09	215	TINGGI	945	SEDANG
7	Moutong	93.76	27.85	122	TINGGI	1,027	SEDANG
8	Ongka Malino	92.32	18.63	111	TINGGI	726	RENDAH
9	Palasa	33.53	10.67	44	TINGGI	454	SEDANG
10	Parigi	131.72	26.74	158	TINGGI	926	SEDANG
11	Parigi Barat	30.01	7.31	37	TINGGI	440	RENDAH
12	Parigi Selatan	102.71	31.72	134	TINGGI	699	SEDANG
13	Parigi Tengah	35.14	17.81	53	TINGGI	364	RENDAH
14	Parigi Utara	27.05	10.28	37	TINGGI	437	SEDANG
15	Sausu	96.25	38.97	135	TINGGI	495	TINGGI
16	Sidoan	54.16	26.97	81	TINGGI	482	SEDANG
17	Siniu	30.99	4.06	35	TINGGI	350	RENDAH
18	Taopa	60.11	46.03	106	TINGGI	1,516	SEDANG
19	Tinombo	80.34	18.62	99	TINGGI	500	SEDANG
20	Tinombo Selatan	67.81	15.11	83	TINGGI	862	SEDANG
21	Tomini	57.41	40.09	98	TINGGI	710	RENDAH
22	Toribulu	118.75	10.36	129	TINGGI	846	SEDANG
23	Torue	1,693.65	27.54	1,721	TINGGI	1,076	SEDANG
Kab Parigi Moutong		3,419	501	3,920	TINGGI	14,824	SEDANG

(Sumber Gambar: Dokumen Kajian Rencana Bencana Parigi Moutong tahun 2023-2028)

Kecamatan Balinggi mengalami dampak banjir yang dominan pada sektor pertanian, terutama kerusakan lahan persawahan yang menurunkan pendapatan petani. Meski data mencatat kerusakan lingkungan rendah-sedang, kondisi lapangan menunjukkan kerugian nyata lebih besar, sehingga Balinggi tetap berisiko tinggi secara ekonomi.

Pengukuran tingkat kapasitas dilakukan berdasarkan aspek kebijakan, kesiapsiagaan, dan peran serta masyarakat. Penilaian kapasitas dilakukan dengan

menggabungkan komponen ketahanan daerah pada tingkat pemerintah daerah dan kesiapsiagaan desa di Kabupaten Parigi Moutong sebagai bagian dari penanggulangan bencana.

**Tabel 2. Kapasitas Parigi Moutong Dalam Menghadapi Banjir Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Kelas		
		Ketahanan Daerah	kesiapsiagaan	Kapasitas
1	Ampibabo	SEDANG	RENDAH	RENDAH
2	Balinggi	SEDANG	RENDAH	RENDAH
3	Bolano	SEDANG	RENDAH	RENDAH
4	Bolano Lambunu	SEDANG	RENDAH	RENDAH
5	Kasimbar	SEDANG	RENDAH	RENDAH
6	Mepanga	SEDANG	RENDAH	RENDAH
7	Moutong	SEDANG	RENDAH	RENDAH
8	Ongka Malino	SEDANG	RENDAH	RENDAH
9	Palasa	SEDANG	RENDAH	RENDAH
10	Parigi	SEDANG	RENDAH	RENDAH
11	Parigi Barat	SEDANG	RENDAH	RENDAH
12	Parigi Selatan	SEDANG	RENDAH	RENDAH
13	Parigi Tengah	SEDANG	RENDAH	RENDAH
14	Parigi Utara	SEDANG	RENDAH	RENDAH
15	Sausu	SEDANG	RENDAH	RENDAH
16	Sidoan	SEDANG	RENDAH	RENDAH
17	Siniu	SEDANG	RENDAH	RENDAH
18	Taopa	SEDANG	RENDAH	RENDAH
19	Tinombo	SEDANG	RENDAH	RENDAH
20	Tinombo Selatan	SEDANG	RENDAH	RENDAH
21	Tomini	SEDANG	RENDAH	RENDAH
22	Toribulu	SEDANG	RENDAH	RENDAH
23	Torue	SEDANG	RENDAH	RENDAH
Kab Parigi Moutong		SEDANG	RENDAH	RENDAH

(Sumber Gambar: Dokumen Kajian Rencana Bencana Parigi Moutong tahun 2023-2028)

Hasil kajian menunjukkan bahwa Kecamatan Balinggi memiliki ketahanan daerah sedang, namun kesiapsiagaan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program penanggulangan bencana sudah ada, kapasitas Balinggi menghadapi banjir secara keseluruhan masih terbatas dan perlu peningkatan, terutama pada kesiapsiagaan dan peran masyarakat. Selain berdasarkan KRB, kondisi risiko banjir di Desa Balinggi Jati juga didukung oleh data kejadian bencana yang dihimpun dari Pemerintah Desa Balinggi Jati

**Tabel 3 Tabulasi Data Dampak Banjir Desa Balinggi Jati**

No	Uraian	Jumlah / Luas	Keterangan
1	Kepala Keluarga (KK)	473 KK / 1.136 Jiwa	Penduduk terdampak banjir
2	Persawahan	500 Hektar	Sawah warga terendam air dan lumpur
3	Permukiman	5 Hektar	Area permukiman terdampak
4	Rumah	150 Unit	Rumah terendam air

		3 Unit	Rumah rusak berat
5	Fasilitas Umum	2 Unit	Tempat ibadah
		1 Unit	SD Inpres 2 Balinggi
		1 Unit	TK Negeri 3 Balinggi
		1 Unit	Kantor Desa Balinggi Jati
6	Lansia	90 Orang	Kelompok rentan
7	Balita	45 Orang	Kelompok rentan
8	Bayi	9 Orang	Kelompok rentan
9	Korban Jiwa	1 Orang	Perempuan

(Sumber: Berita Acara Kejadian Pemerintah Desa Balinggi Jati, 29 Mei 2023)

Data yang disajikan merupakan hasil pendataan Pemerintah Desa Balinggi Jati sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Kejadian tanggal 29 Mei 2023. Tabulasi ini menggambarkan jumlah penduduk terdampak, kelompok rentan, serta dampak terhadap permukiman, fasilitas umum, dan lahan persawahan akibat banjir. Berdasarkan tabulasi tersebut, tercatat sebanyak 473 kepala keluarga atau 1.136 jiwa terdampak, termasuk lansia, balita, dan bayi, serta terdapat korban jiwa. Data ini merepresentasikan dampak kebijakan penanggulangan banjir yang diterima oleh Desa Balinggi Jati sebagai target kebijakan.

Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Desa Balinggi Jati. Pada bagian ini, peneliti melakukan analisis kritis dengan membandingkan dokumen perencanaan pemerintah terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Mengacu pada teori Knill & Tosun (2020), terdapat enam kriteria yang menjadi tolok ukur dalam melihat sejauh mana kebijakan ini berjalan di Desa Balinggi Jati:

### 1. Pilihan Instrumen Kebijakan (*Policy Instruments*)

Penanggulangan banjir di Desa Balinggi Jati menunjukkan bahwa kebijakan BPBD Kabupaten Parigi Moutong telah didukung oleh dasar hukum dan SOP melalui Perbup Nomor 02 Tahun 2013 yang mengatur tahapan penanggulangan banjir dari prabencana hingga pascabencana. BPBD menjadi aktor utama dalam penyediaan sumber daya, pengarahan evakuasi, dan penyaluran bantuan saat bencana terjadi. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat desa masih bergantung pada laporan dan koordinasi, sehingga respons di lapangan cenderung lambat, seperti keterlambatan pengiriman alat berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan BPBD telah tersedia, efektivitas implementasinya belum maksimal dalam menjangkau kebutuhan mendesak masyarakat desa terdampak banjir.

### 2. Desain Kebijakan (*Policy Design*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir di Desa Balinggi Jati bersifat berulang dan disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu DAS serta perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Kondisi ini tercermin dari peta KRB yang menunjukkan potensi bahaya banjir seluas 2.667 hektare dengan 3.168 jiwa penduduk terpapar, serta data BPBD yang mencatat banjir terjadi hampir setiap tahun, termasuk kejadian tahun 2023 yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan permukiman, lahan persawahan, serta fasilitas umum. Namun, desain kebijakan

penanggulangan banjir BPBD belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik masalah tersebut, karena pengendalian terhadap penyebab utama banjir masih berada pada tahap perencanaan dan implementasi kebijakan lebih berfokus pada penanganan dampak di wilayah hilir. Dalam perspektif Knill dan Tosun, ketidaksesuaian desain kebijakan dengan karakteristik masalah inilah yang menyebabkan risiko banjir belum dapat dikurangi secara berkelanjutan.

### **3. Struktur Pengawasan (*Oversight Structure*)**

Struktur pengawasan dalam kebijakan penanggulangan banjir di Desa Balinggi Jati lebih berfungsi sebagai pengawas bantuan pascabencana dibandingkan pengawas risiko. Dalam kerangka Knill & Tosun, pengawasan seharusnya menurunkan indeks bahaya melalui pemantauan faktor penyebab banjir, namun tidak terdapat monitoring terhadap aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu DAS. Kondisi ini tercermin pada banjir tahun 2023 yang mengakibatkan 1 korban jiwa dan 1.165 unit rumah terdampak, serta kerusakan ±500 hektare persawahan dan sejumlah fasilitas umum. Pengawasan tidak berperan sebagai deteksi dini, melainkan baru aktif pada tahap pendataan kerusakan, ditandai pula dengan respons teknis yang lambat seperti kedatangan alat berat sekitar satu minggu setelah banjir. Dengan demikian, struktur pengawasan tidak menjalankan SOP penurunan bahaya sebagaimana diatur dalam Perbup, dan cenderung menjadi formalitas administratif pelaporan kerugian.

### **4. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)**

Lemahnya struktur organisasi di tingkat desa terlihat dari belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Desa Balinggi Jati. Kendala anggaran dan mekanisme pembentukan yang tersentralisasi menyebabkan koordinasi bencana masih bersifat informal. Dampak dari ketiadaan lembaga terlatih ini berimplikasi pada fatalitas dampak, sebanyak 473 kepala keluarga atau 1.136 jiwa terdampak, termasuk lansia, balita, dan bayi, serta terdapat korban jiwa pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan ketiadaan sistem kelembagaan yang terstandarisasi dalam mereduksi risiko nyata bagi warga.

### **5. Kemampuan Administratif (*Administrative Capacity*)**

Terdapat ketimpangan kapasitas administratif antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam penanggulangan banjir. BPBD Kabupaten Parigi Moutong memiliki pagu anggaran sebesar Rp56,8 miliar, Alokasi anggaran terbesar difokuskan pada respon cepat darurat berupa pencarian dan evakuasi korban sebesar 50 miliar rupiah. Kegiatan rekonstruksi sebagian besar dialokasikan untuk perbaikan jalan (Rp2 miliar) dan sektor pertanian (Rp2,4 miliar), sementara pemerintah desa hanya menganggarkan Rp20.000.000 per tahun. Regulasi penggunaan Dana Desa yang hanya dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat membatasi desa untuk melakukan upaya pencegahan, sehingga menimbulkan kondisi “kelumpuhan preventif”, di mana lemahnya kapasitas administratif desa disebabkan oleh desain kebijakan dan pengaturan fiskal yang belum mendukung mitigasi banjir secara berkelanjutan.

## 6. Penerimaan Sosial (*Social Acceptance*)

Meskipun solidaritas masyarakat sangat tinggi saat fase darurat, peneliti menemukan rendahnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan drainase dari sampah dan adanya kegiatan perusakan lahan di hul. Secara akademik, hal ini menunjukkan internalisasi nilai-nilai mitigasi belum sepenuhnya menyatu dalam perilaku harian masyarakat. Dalam hal ini perusakan lahan di hulu tidak dihentikan secara permanen oleh pemerintah. Sehingga masyarakat yang terdampak mengharapkan solusi jangka panjang dari pemerintah agar kejadian banjir tidak terjadi berulang-ulang

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Desa Balinggi Jati dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan banjir telah dilaksanakan pada tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana, dengan penekanan utama pada tahapan tanggap darurat dan pascabencana. Pada tahap prabencana, kebijakan lebih bersifat imbauan dan belum ditopang oleh regulasi desa serta pengawasan yang berkelanjutan. Tahap tanggap darurat dan pascabencana diwujudkan melalui evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, pembersihan lingkungan, perbaikan infrastruktur, dan penyaluran bantuan. Implementasi kebijakan menunjukkan ketidakseimbangan antar tahapan penanggulangan bencana sehingga diperlukan penguatan integrasi kebijakan secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Cetakan ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan publik: Konsep dan aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking* (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Anggresu, G., Tulusan, F., & Londa, V. (2019). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Anshori, M. (2019). *Kebijakan publik*. Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Universitas Airlangga.
- Ariyanti, I. A. (2020). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana (Studi deskriptif tentang penanggulangan bencana letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 23–32. <https://journal.unair.ac.id/>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. (2023). *Buku saku penanggulangan bencana*. Jakarta.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong. (2023–2028). *Kajian risiko bencana BPBD Kabupaten Parigi Moutong*. Parigi Moutong: Dokumen internal.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong. (2023–2028). Rencana penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Parigi Moutong. Parigi Moutong: Dokumen Internal.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong. (2024). Dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kabupaten Parigi Moutong. Parigi Moutong: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong. (2024). Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024–2026. Parigi Moutong: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
- Carter, W. N. (2008). *Disaster management: A disaster manager's handbook*. Manila, Philippines: Asian Development Bank.
- Coppola, D. P. (2015). *Introduction to international disaster management* (3rd ed.). Oxford, England: Butterworth-Heinemann.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Henry, N. (1980). *Public administration and public affairs*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Herald, W. (2020). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana (Studi tentang penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah). *Jurnal IPDN*, 2(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/>
- Hikmat, H. (2014). *Metode penelitian dalam perspektif ilmu sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy: A new introduction*. London, England: Bloomsbury Publishing.
- Megawati, F. P. (2008). *Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan pada wajib pajak badan perseroan terbuka* [Skripsi, Universitas Indonesia]. Depok: Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/>
- Pemerintah Desa Balinggi Jati. (2025). *Gambaran umum Desa Balinggi Jati*. Parigi Moutong: Dokumen internal.
- Pemerintah Desa Balinggi Jati. (2025). *Sejarah singkat Desa Balinggi Jati*. Parigi Moutong: Dokumen internal.
- Pemerintah Desa Balinggi Jati. (2025). *Visi misi Desa Balinggi Jati*. Parigi Moutong: Dokumen internal.

- Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. (2012). Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Parigi: Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (2013). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Palu: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setyowati, A. C. (2021). Implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana tanah longsor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang. E-Jurnal Undip, 1(1). <https://ejournal.undip.ac.id/>
- Suandi, I. W. (2010). Eksistensi kebijakan publik dan hukum dalam pemerintahan daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali, 1(1). <https://ojs.unud.ac.id/>

## **TENTANG PENULIS**